



IMPLEMENTASI KERJASAMA UN *WOMEN* DAN NCW DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR (2017-2022)

Andrea Aletta¹, Rizky Hikmawan², Shanti Darmastuti³.

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

Abstract

Egypt is one of the countries in the Arab world that still adheres to patriarchal traditions. Egypt has taken several steps in recent years to adapt and reform its legal and policy frameworks to support women's political participation. Egypt has established various institutions in accordance with Article 214 of the 2014 Constitution, one of which is the National Council for Women (NCW). NCW was founded in 2000 to consolidate all national efforts on gender equality and women's empowerment. The low level of women political participation in Egypt then attracted the attention of the International Organization, UN Women, to help NCW in increasing women's political participation. UN Women is a United Nations organization dedicated to gender equality and women's empowerment.

Keywords: Political Participation, Gender Equality, International Organizations, International Cooperation

Abstrak

Mesir merupakan salah satu negara kawasan dunia Arab yang masih menganut tradisi patriarki. Mesir telah mengambil beberapa langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk mengadaptasi dan mereformasi kerangka hukum dan kebijakannya untuk mendukung partisipasi politik perempuan. Mesir telah mendirikan berbagai institusi sesuai dengan Pasal 214 UUD 2014 salah satunya adalah *National Council for Women* (NCW). NCW didirikan pada tahun 2000 untuk mengkonsolidasikan semua upaya nasional mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rendahnya partisipasi politik perempuan di Mesir kemudian menarik perhatian Organisasi Internasional yaitu UN Women untuk turut membantu NCW dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. UN Women merupakan organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan





perempuan. Kerja sama kedua organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam ruang publik, khususnya partisipasi politik perempuan di Mesir.

Kata kunci : *Partisipasi politik, Organisasi Internasional, Patriarki*

Pendahuluan

Mesir merupakan salah satu negara kawasan dunia Arab yang masih menganut tradisi patriarki. Masyarakat Mesir berpandangan bahwa derajat perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki. Masyarakat Mesir dengan konsep budaya patriarkinya menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya pemilik kekuasaan mutlak dalam keluarga. Melihat dari kebudayaan arab yang patriarkat serta pemahaman mereka terhadap tafsir teologi agama yang kurang kemudian melahirkan sejumlah ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Mesir adalah salah satu negara di Timur Tengah dengan tingkat kesetaraan perempuan yang rendah yaitu berada di posisi 136 dari total 145 negara, ranking ke 135 dalam gender gap di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi, kemudian berada di posisi 115 di bidang kesetaraan pendidikan dan juga dalam hal pemberdayaan politik perempuan Mesir berada pada posisi ke 136 (World Economic Forum, 2015). *The Gender Inequality Index* (GII) untuk Mesir telah mencatat nilai 0,565 pada tahun 2015 dan menempatkan Mesir di posisi 135 dari antara 159 negara.

Partisipasi politik penuh dan efektif oleh kaum perempuan termasuk dalam masalah hak asasi manusia, pertumbuhan inklusi dan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan politik perempuan merupakan syarat esensial demokrasi pemerintahan dan dapat diukur baik dari segi hak hukum yang diberikan kepada perempuan untuk bisa memilih, mengekspresikan pendapat, dan mencalonkan diri untuk jabatan terpilih serta dalam pelaksanaan praktis dari hak-hak hukum. Berpartisipasi dalam lembaga publik seperti parlemen, dewan lokal atau pemerintahan memungkinkan perempuan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pembuatan hukum yang nantinya akan berdampak pada hak, perilaku dan hidup.

Partisipasi perempuan di Mesir ditandai dengan keterlibatan aktif mereka pada tahun 1919. Pada tahun 1923, *Egyptian Feminist Union* (EFU) yang dipimpin oleh Hoda Shaarway dibentuk





untuk mendukung revolusi dan pada tahun 1925 mereka menuntut hak perempuan untuk memilih dalam pemilihan. Pada tahun 1959, konstitusi Mesir memberi perempuan hak untuk memilih dan mencalonkan diri untuk pemilihan parlemen. Tahun 1957 merupakan awal dari masuknya perempuan ke dalam parlemen dengan delapan perempuan mencalonkan diri untuk parlemen dan dua kemenangan, yaitu Rawaya Attia untuk distrik Giza dan Amina Shoukry untuk Iskandariyah. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Anwar Al Sadat dikeluarkan UU21/1979. Undang-undang tersebut mengalokasikan 30 kursi parlemen untuk perempuan yang kemudian berujung pada peningkatan signifikan terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dari 8 menjadi 35 perempuan (Zeid, 2006). Momen ini diikuti dengan serangkaian perkembangan politik dan sosial ekonomi di masyarakat Mesir, termasuk pergeseran dari sistem satu partai ke sistem multi-partai dan dari pusat ekonomi pasar. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Hosny Mubarak dikeluarkan keputusan Nomor 20 Februari 2000, yaitu pembentukan *National Council for Women* (NCW) sebagai lembaga independen yang berafiliasi dengan kepresidenan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Pada 25 Januari 2011 terjadi suatu revolusi yang menyerukan kebebasan, kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Perempuan Mesir telah muncul sebagai aktor politik yang penting dan ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih maupun calon. Gelombang kedua revolusi 25 Januari meletus kembali dua tahun kemudian dengan tujuan menggulingkan rezim yang mengancam akan mengabaikan hak-hak yang telah diperjuangkan perempuan dan membalikkan pencapaian yang sudah dicapai untuk menciptakan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan untuk bisa menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam politik merupakan perjuangan yang berat. Diskriminasi terhadap kaum perempuan ini sudah mengakar dalam kurun waktu yang lama dan berlangsung secara sistematis yang kemudian menjadi faktor penghambat bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di Mesir. Partai-partai Islam di Mesir, salah satunya garis keras Salafi telah memaksa kaum perempuan untuk menutup diri dan cukup mengurus kehidupan internal keluarga yang kemudian hal tersebut menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk berada dalam lembaga legislatif (Garcia & Ziada, 2012).

Masalah ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki bukan pada apakah perempuan mampu berperan aktif dalam membangun demokrasi dan perdamaian karena pada kenyataannya mereka selalu berusaha untuk berkontribusi di banyak tingkatan, baik swasta maupun ruang publik.





Kompleksitasnya terletak pada sistem yang sudah mengakar dan dinilai mendiskriminasi serta marginalisasi perempuan.

Tradisi patriarki terhadap perempuan masih menjadi salah satu faktor utama penghambat partisipasi perempuan dalam ruang publik, terlihat pada cara memandang bahwa pekerjaan politik sebaiknya diserahkan kepada laki-laki. Perempuan seringkali dinilai kurang dapat meyakinkan orang lain, berdebat, bernegosiasi dan juga menciptakan aliansi politik yang efektif. Oleh karena itu, sikap inilah yang membuat sulit bagi perempuan untuk berkampanye di Mesir. Penjelasan selanjutnya yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah ketimpangan ekonomi. Sikap patriarki tersebut juga bermanifestasi terhadap kekerasan berbasis gender. Sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa tingkat kekerasan pada perempuan di Mesir cukup tinggi. Hampir separuh perempuan yang pernah menikah usia 18-64 tahun di Mesir dilaporkan mengalami berbagai kekerasan dari pasangannya dengan 32% melaporkan kekerasan fisik dan 12% kekerasan seksual (CAPMAS, 2015). Kemudian, ekonomi yang kurang beruntung juga berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengejar karir di bidang politik. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap kampanye politik yang efektif dan juga memiliki sumber daya yang baik sebagai pendukung elektabilitas mereka.

Sejumlah organisasi internasional telah menjadikan isu diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi di berbagai negara sebagai perhatian utama mereka. United Nations Women adalah salah satu organisasi multinasional tersebut (UN Women). Pembentukan UN Women merupakan komponen dari gerakan global untuk memajukan hak-hak perempuan yang mencakup semua negara anggotanya. UN Women adalah bagian dari program reformasi PBB, menggabungkan sumber daya dan mandat untuk membawa perubahan dan memiliki dampak yang lebih besar, sangat meningkatkan inisiatif PBB untuk memajukan kesetaraan gender, meningkatkan peluang, dan menghapuskan diskriminasi secara global (International IDEA, 2013)

Sehubung dengan masalah kurangnya partisipasi perempuan dan kesetaraan peran perempuan dalam perpolitikan di Mesir, UN Women di Mesir kemudian membuat beberapa program untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan dalam berpolitik di Mesir. UN Women bersama dengan organisasi nasional independen perempuan di Mesir yaitu *National Council for Women* (NCW) kemudian bekerjasama dalam berusaha meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir.





Dalam mendukung NCW terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai perpolitikan serta perannya, UN Women di Mesir membantu menjangkau 35.000 wanita di 27 kegubernuran, mendorong mereka untuk memilih atau mencalonkan diri serta memastikan keterwakilan dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Upaya kemitraan antara UN Women dan NCW sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di seluruh tingkatan.

Salah satu program dari UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam berpolitik adalah dibuatnya *Women's Political Empowerment (WPE)*. Melalui program WPE, NCW mendapat dukungan teknis maupun keuangan. UN Women bekerjasama dengan NCW untuk mengadvokasi dan menerapkan kegiatan hukum dan sosial untuk berkontribusi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dukungan UN Women kepada mitra nasional khususnya NCW sebagai lembaga yang diamanatkan untuk pemberdayaan perempuan melalui WPE merupakan komitmen internasional.

Dalam kemitraannya dengan NCW, UN Women terus mendukung pelaksanaan implementasi partisipasi politik perempuan di pos revolusi Mesir yang tentunya bertujuan untuk memajukan partisipasi dan representasi perempuan dengan mempromosikan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik termasuk mencalonkan diri dan memilih dalam pemilu. Dukungan yang diberikan terutama di bawah program WPE disalurkan melalui pengembangan kapasitas kepada NCW dalam bentuk penyediaan saran teknis, produk pengetahuan, serta berbagai kesempatan pelatihan dalam manajemen proyek, perencanaan keuangan maupun pada berbagai isu substansif. UN Women juga mendukung kolaborasi antara pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan..

Metode

Model penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menyelidiki suatu hal, fenomena sekelompok orang, aliran pemikiran, atau kejadian terkini (Nazir, 1988). Dengan menawarkan penjelasan faktual, tepat, dan terorganisir tentang fenomena yang sedang diselidiki. Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Studi literatur didefinisikan sebagai proses pengumpulan dokumen kualitatif, termasuk dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor dan teks pidato) (Creswell,





2016). Ia menambahkan, mempelajari literatur memberikan berbagai manfaat, antara lain kemampuan peneliti untuk mengumpulkan istilah bahasa dan tekstual dari partisipan, akses tak terbatas ke data ini setiap saat, dan data yang telah teruji, berkualitas, dan dapat digunakan untuk menghemat waktu. dan uang. Sedangkan menurut (Nazir, 1988), studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan melihat makalah, buku, catatan, dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Pemerintah Melalui NCW

Kerangka kelembagaan yang kuat sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender secara efektif dan terkoordinasi serta memajukan pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan. Hal tersebut juga membantu secara komprehensif membentuk peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam kerangka hukum suatu negara. Mesir telah mendirikan berbagai institusi sesuai dengan Pasal 214 UUD 2014. Undang-undang ini mengatur struktur dan mandat institusi-institusi tersebut, salah satunya adalah *National Council for Women* (NCW). NCW didirikan pada tahun 2000 untuk mengkonsolidasikan semua upaya nasional mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sejak 2014, Mesir melalui NCW telah meluncurkan sejumlah strategi nasional termasuk *the National Women's Strategy 2030* yaitu strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan strategi peninggalan pernikahan dini. Presiden Abdel Fattah Al-Sisi meluncurkan NWS 2030 sebagai peta jalan di mana Mesir akan memastikan semua kemajuan menuju tercapainya SDGs yaitu peka terhadap isu gender. Strategi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua perempuan di Mesir, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan di Mesir Hulu, rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, lansia dan perempuan dengan disabilitas. Strategi tersebut memiliki empat pilar utama, yaitu (UN Women, 2018):

- 1) Pemberdayaan politik dan kepemimpinan
- 2) Pemberdayaan ekonomi
- 3) Pemberdayaan sosial





4) Perlindungan

Penelitian OECD menunjukkan bahwa perkembangan kesetaraan gender nasional yang disponsori oleh pemerintah baik secara visi maupun strategi merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender. (OECD-CAWTAR, 2014). Strategi pemerintah memungkinkan implementasi praktis dari reformasi kesetaraan gender berdasarkan standar internasional, dengan tujuan akhir menghilangkan hambatan untuk kesetaraan gender dan mempromosikan inklusi perempuan dalam pembangunan sosial, politik dan ekonomi negara (OECD/CAWTAR, 2014).

NCW memiliki mandat yang digunakan sebagai acuan dalam memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan. Beberapa mandat tersebut, yaitu (Khodair, 2015):

- Mengusulkan hal-hal kebijakan publik bagi masyarakat dan Lembaga konstitusional mengenai pembangunan dan pemberdayaan perempuan untuk memainkan peran mereka dalam sosial dan ekonomi serta mengintegrasikan upaya mereka dalam program pembangunan yang komprehensif.
- Menyusun rencana nasional untuk kemajuan perempuan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik tentang isu-isu perempuan dan untuk menyampaikan usulan yang relevan kepada instansi terkait.
- Memberi nasihat dan anjuran mengenai rancangan undang-undang dan keputusan yang berkaitan dengan perempuan sebelum diserahkan kepada otoritas yang berwenang serta merekomendasikan rancangan undang-undang dan keputusan yang diperlukan untuk kemajuan perempuan.
- Mewakili perempuan dalam forum dan organisasi internasional yang menangani masalah perempuan.
- Mendirikan pusat dokumentasi untuk mengumpulkan informasi, data dan penelitian yang berkaitan dengan perempuan, dan juga untuk melakukan penelitian dan kajian terkait.
- Mengadakan konferensi, seminar, symposium dan debat masalah perempuan.
- Menyelenggarakan sesi pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan peran, hak dan kewajiban perempuan.





- Menerbitkan bulletin, majalah, dan publikasi lainnya untuk menginformasikan kepada publik mengenai fungsi dan tujuan Dewan.
- Melaksanakan penelitian terhadap masalah-masalah yang dirujuk oleh presiden.

NCW telah mendirikan *Center for the Political Empowerment of Women* yang bertujuan untuk menyiapkan kader perempuan terlatih untuk mencalonkan diri untuk pemilihan parlemen tahun 2005 dan dewan lokal pemilu tahun 2006 melalui pembekalan diri dengan ketrampilan teknis dan manajerial. Sebuah program khusus untuk peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Budaya dalam bentuk forum politik di seluruh negara.

Namun, presentase perempuan di parlemen masih mengecewakan. Hanya 1,5% dari parlemen 2005 yang merupakan perempuan. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, NCW mengambil posisi netral terhadap semua kandidat dan tidak mendukung kualifikasi kandidat tertentu. Dengan demikian mereka tidak bisa menang sendiri. Kedua, menjalankan kegiatan kampanye memerlukan biaya yang sangat besar. Kandidat perempuan dalam sebagian kasus tidak dapat memenuhi biaya tersebut. Ketiga, prevalensi budaya dan persoalan warisan diskriminasi terhadap perempuan, dimana ada persepsi masyarakat mengenai pembagian tenaga kerja yang masih tradisional. Perempuan masih dipandang hanya terkait pada hal-hal dan fungsi-fungsi tertentu. Tentunya pandangan tersebut merupakan hambatan utama yang menghambat perempuan dalam berpartisipasi secara politik. (Khodair, 2015)

Berbagai upaya dan kegiatan menjanjikan yang dilakukan oleh NCW ternyata masih belum efektif karena banyak sekali kelemahan serta hambatan yang menghalangi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Hambatan-hambatan seperti warisan budaya patriarki dan konstitusi serta kerangka hukum yang belum bisa mengakomodir perempuan masih menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Kerjasama NCW dan UN Women

UN Women telah beroperasi di Mesir sejak tahun 2012. Sejalan dengan komitmen internasional Mesir pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan kerangka kerja





strategis yang ada, didukung oleh UN Women untuk memberdayakan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. *Country Office* (CO) dan *Strategic Note* (SN) merupakan alat perencanaan utama dukungan UN Women terhadap normatif, koordinasi dan operasional kerja di Mesir.

Kerjasama antara UN Women dan NCW melibatkan beberapa aspek penting dalam upaya mereka untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berikut adalah beberapa aspek kerjasama yang dapat diidentifikasi (United Nations, 2020) :

- **Advokasi Bersama:** UN Women dan NCW berkolaborasi dalam melakukan advokasi bersama untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan. Mereka mengampanyekan perubahan sosial dan kebijakan yang berpihak pada perempuan, serta menyuarakan kepentingan dan masalah yang dihadapi perempuan di tingkat nasional dan internasional.
- **Perumusan Kebijakan:** Kerjasama ini melibatkan upaya bersama untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. UN Women memberikan dukungan teknis kepada NCW dalam mengembangkan kebijakan yang progresif, yang mencakup isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, kekerasan berbasis gender, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan partisipasi politik perempuan.
- **Penguatan Lembaga:** UN Women mendukung NCW dalam penguatan lembaga sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal perempuan dan kesetaraan gender. Ini mencakup bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas NCW dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mempromosikan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat peran dan fungsi NCW dalam advokasi gender di tingkat nasional.
- **Pengumpulan Data dan Penelitian:** UN Women dan NCW bekerja sama dalam pengumpulan data, penelitian, dan pemantauan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender di Mesir. Mereka melakukan penelitian bersama, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisis situasi perempuan di berbagai bidang. Data ini digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan memberikan dasar yang kuat bagi advokasi dan program-program yang efektif.





- Pemberdayaan Perempuan: Kerjasama UN Women dan NCW difokuskan pada pemberdayaan perempuan. Mereka bekerja sama dalam menyediakan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, sumber daya ekonomi, dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui program-program pemberdayaan, mereka berusaha untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar perempuan dapat mencapai potensi penuh mereka.
- Jaringan dan Kolaborasi: UN Women dan NCW juga berupaya membangun jaringan dan kolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain yang memiliki tujuan yang serupa. Mereka melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dengan tujuan memperkuat kerjasama dan memaksimalkan dampak mereka dalam memajukan kesetaraan gender.

Pada 2018, UN Women bekerja sama dengan pemerintah nasional, regional dan mitra internasional dalam membangun pengetahuan dan alat advokasi, menciptakan kemitraan strategis dan penguatan kapasitas lokal untuk mendorong peran yang lebih kuat bagi laki-laki dalam menciptakan kesetaraan gender dan mendukung hak-hak perempuan. Dalam menjalankan aspek kerjasama yaitu aspek advokasi, UN Women bersama dengan NCW membuat beberapa program seperti Program *Men and Women for Gender Equality* (MWGE) merupakan produk pengetahuan yang dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di berbagai sektor. Selain itu, kegiatan dan kebijakan di tingkat masyarakat dilaksanakan untuk memastikan partisipasi laki-laki dalam memajukan kesetaraan gender dan akhirnya platform advokasi dan komunikasi dibuat untuk mempromosikan pesan kemitraan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang membutuhkan perubahan norma dan stereotip tantangan sosial dan diskriminasi dalam masyarakat Mesir (UN Women, 2018).

Dialog kebijakan antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, akademisi, dan sektor swasta dikoordinasikan untuk mengeksplorasi mekanisme yang dapat diadopsi oleh pemerintah Mesir untuk memastikan kesetaraan gender tercerminkan dalam perumusan legislative dan kebijakan, dan juga di tingkat eksekutif. Dialog kebijakan tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi yang berfokus pada empat bidang tematik yaitu melibatkan laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender, melibatkan laki-laki dalam pemberian perawatan, sosialisasi gender, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Implementasi rekomendasi akan berlangsung





selama fase program yang akan datang, bekerja sama dengan NCW dan kementerian pendidikan, kementerian pemuda dan olahraga, dan kementerian solidaritas sosial.

Kerjasama dengan NCW masih berlanjut pada kegiatan advokasi yang dilaksanakan di 27 provinsi dengan membawa tema bagaimana menarik laki-laki untuk turut menjunjung tinggi kesetaraan gender. Pelatihan peningkatan kapasitas diberikan kepada perempuan dan laki-laki untuk memobilisasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap kaum laki-laki yang masih belum teredukasi untuk bisa ikut menarik dan menjangkau lebih dari 24.000 anggota masyarakat.

Peluncuran beberapa kampanye yang menangani kejahatan dunia maya juga dilakukan, seperti: Kampanye Speak Up, Kampanye anti intimidasi online melalui media sosial Instagram, Kampanye keselamatan perempuan melalui Facebook, video kampanye lain dengan advokasi selebritas untuk keamanan dunia maya. Peluncuran kampanye untuk peningkatan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam undang-undang yang baru diadopsi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak hukum mereka. Kampanye tercapai kepada sekitar 35 juta wanita di lapangan selama 3 tahun terakhir. Kampanye tersebut mengandalkan komunikasi tatap muka dengan perempuan di desa-desa. kampanye tersebut juga membahas topik-topik seperti: Kekerasan terhadap perempuan, status hukum pribadi, hak hukum, risiko FGM, partisipasi politik perempuan dan masalah perempuan lainnya. UN Women membantu NCW dalam merencanakan berbagai kegiatan dan menjadi otak utama dalam program tersebut dan pemerintah Mesir melalui NCW yang menjalankan program tersebut. (UN Women Egypt Country Office, 2017)

Aspek penguatan lembaga dapat dilihat melalui dukungan terhadap implementasi dari *National Strategy for the Empowerment of Women 2030*. UN Women Egypt turut memainkan peran penting dalam penyediaan teknis bantuan, jaminan kualitas dan dokumentasi dari *Women's Citizenship Initiative (WCI)* di bawah kemitraan strategis yang didirikan bersama dengan lembaga pemerintah dan cabang daerahnya. Program ini dinilai menjadi salah satu program yang paling diakui secara politik dan merupakan program pembangunan milik nasional di Mesir karena kontribusi utamanya bagi kemajuan "*IMPACT AREA 1*" *Women's Political Empowerment (WPE)* di bidang politik dan sosial ekonomi. Sejalan dengan SDGs, *Egypt's Sustainable Development Strategy (SDS)*, dan *National Strategy for the Empowerment for the Egyptian Women 2030*, program tersebut merupakan tanggapan terhadap SDG 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan





semua perempuan, karena menyediakan akses kepada perempuan untuk menikmati hak sosial, politik dan ekonomi perempuan dan merupakan langkah untuk memastikan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan (UN Women Egypt Country Office, 2017).

Kerjasama UN Women dan NCW juga sangat mengedepankan aspek pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan pilar legislatif PBB, UN Women di Mesir bekerja sama dengan NCW untuk mendirikan dan membuat koordinasi fungsional yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan kekerasan pada perempuan. Peningkatan partisipasi politik perempuan di Mesir tentunya akan terjadi peningkatan apabila diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dihilangkan. UN Women Egypt sangat percaya pada kekuatan komunikasi dan advokasi untuk mendukung pencapaian dengan hasil yang luar biasa pada setiap target audiens yang berbeda. Di bawah pilar kedua mengenai intervensi komunitas, UN Women bersama dengan NCW bekerja keras untuk mengubah kebiasaan budaya menyalahkan dan menghilangkan hak-hak perempuan jika terjadi kekerasan pada perempuan. Mereka menggunakan pendekatan dan metodologi yang kreatif dan partisipatif seperti melalui olahraga, teater dan kelas bela diri. Pilar ketiga adalah mengenai penguatan kapasitas dan peningkatan layanan dan keselamatan untuk para penyintas dan memperkuat kantor pengaduan perempuan. Adapun pilar keempat yaitu UN Women bekerja untuk menciptakan kota yang lebih aman untuk perempuan dan anak perempuan di Mesir.

UN Women juga turut bekerjasama dengan NCW dalam memperdayakan perempuan, khususnya untuk mencapai kesetaraan ekonomi agar dapat menunjang partisipasi perempuan dalam perpolitikan Mesir. Mendukung kegiatan perpolitikan perempuan di Mesir, tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan banyak perempuan di Mesir yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik. *Egypt's Sustainable Development Strategy (SDS)* dan *the National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030* sangat menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas perempuan untuk meningkatkan pekerjaan mereka serta memperluas partisipasi mereka dalam tenaga kerja, kewirausahaan dan tentunya mewujudkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam dunia politik.





Melalui program *Women Political Empowerment* (WPE), UN Women telah memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk memposisikan dirinya secara strategis untuk mengkatalisasi, melengkapi, dan memastikan kohersi upaya atas dasar mitra pembangunan dan pemerintah dalam menerjemahkan komitmen untuk memperkuat kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta membuat posisi dan proses menjadi kebijakan dan tindakan nyata di tingkat nasional dan lokal. Formulasi dan implementasi program WPE selaras dengan strategi dan kerangka nasional serta normatif kerangka kerja internasional, dan didasarkan pada konsultasi dengan mitra nasional. Dibuat pada bulan Juli 2010 oleh Majelis Umum PBB, UN Women diberi mandat yang didasarkan pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Intervensi terprogram WPE membahas prinsip “tidak meninggalkan siapa pun di belakang” dan karenanya lebih terfokus pada kelompok yang paling rentan dan dikesualikan. Misalnya Inisiasi Kewarganegaraan Perempuan menargetkan kelompok yang paling rentan untuk memfasilitasi mereka akses ke kartu identitas vital dan mendapatkan hak, secara resmi diakui oleh negara, dan mengakses layanan sosial dan ekonomi, dan terlibat dalam urusan sipil. Dukungan UN Women kepada mitra nasional yaitu NCW sebagai lembaga yang diamanatkan untuk pemberdayaan perempuan bukan hanya sekedar efektif meningkatkan kapasitas mereka dan mempromosikan kesetaraan gender, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha karena dilakukan melalui kapasitas nasional dan juga memperkuat relevansi program WPE terhadap prioritas nasional dan komitmen internasional.

Kerjasama ini juga berfokus pada penguatan lembaga NCW sebagai lembaga pemerintah yang memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang berhubungan dengan perempuan. UN Women memberikan dukungan teknis dan kapasitas kepada NCW untuk memperkuat peran dan kemampuannya dalam mengadvokasi dan melaksanakan kebijakan gender. Desain program WPE berfokus pada mempromosikan kewarganegaraan dan peran sebagai hak asasi manusia. HAM dan kesetaraan gender tidak hanya tergabung dalam desain program, tetapi di dalamnya implementasi utama ditunjukkan oleh keterpaduan dan koordinasi yang kuat dengan NCW. Perubahan politik yang kuat, masalah keamanan dan sosial budaya bagaimanapun juga masih menjadi penghambat terhadap keterlibatan penuh dari semua kelompok (United Nations, 2020).





Program WPE dirumuskan melalui beberapa konsultasi yang diadakan dengan berbagai LSM, lembaga pemerintah, pusat penelitian, Badan-badan PBB baik regional maupun internasional, serta organisasi kepemudaan. Dalam konsultasi tersebut, peserta ditanya tentang program-program yang dapat didukung oleh UN Women untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam fase transisi, dan yang akan relevan dengan kebutuhan kelompok perempuan yang paling tidak diuntungkan dan memiliki dampak yang paling luas tingkat nasional. Hasil konsultasi ini disetujui dan diadopsi oleh Aliansi Wanita Arab yaitu salah satu Koalisi LSM Mesir dalam rancangan piagam mereka.

Kerjasama UN Women dan NCW melalui program ini berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional. Mereka bekerja sama dalam menyediakan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, sumber daya ekonomi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Program WPE sangat sejalan dengan konvensi internasional yang mengamanatkan peningkatan keterlibatan dalam kehidupan politik yang akan memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih damai dan stabil, sesuai *Nairobi Conference* dan CEDAW serta *Beijing Platform for Action and Security Council Resolution on Women* berkontribusi terhadap pencapaian MDG 3 dan SDGs. Dengan demikian, dari perspektif pendekatan berbasis hak asasi manusia, program WPE sepenuhnya selaras dengan CEDAW (rekomendasi umum 23) yang menyatakan bahwa pihak negara harus mengambil semua tindakan yang tepat menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik dan public kehidupan negara dan, khususnya, harus menjamin perempuan untuk memiliki syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, hak: untuk memilih, dipilih, berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, memegang jabatan publik, dan berpartisipasi dalam LSM dan asosiasi terkait dengan kehidupan politik dan publik (UN Women Egypt Country Office, 2017).

Pekerjaan yang dilakukan melalui program WPE juga didasarkan pada *National Country Assessment* yang memandu UNDAF, dan menjadikannya sepenuhnya selaras dengan *UN One Programme*. UNDAF sendiri sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional Mesir, dan ditandatangani bersama antara Pemerintah Mesir dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.





Program WPE juga sejalan dengan konstitusi yang menyatakan partisipasi politik sebagai hak perempuan dan sejalan dengan aspek kerjasama UN Women dan NCW untuk memberdayakan peran perempuan secara menyeluruh. Intervensi WPE juga diberikan selain pekerjaan operasional, dukungan normatif kepada NCW untuk perumusan dan tindak lanjut sampai dengan rekomendasi dari *Commission on the Status of Women (CSW)*, serta dukungan teknis dan berbagi pengetahuan untuk perumusan laporan nasional ke CEDAW yang telah difinalisasi tahun 2017, serta dukungan untuk menyusun Visi dan Strategi Nasional untuk *National Vision and Strategy for Women's Empowerment 2030*, yang termasuk sebagai salah satu pilarnya pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan politik dan semua pengambilan keputusan. Visi dan Strategi memberikan peluang penting untuk menyesuaikan Agenda 2030 global untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan konteks dan kebutuhan Mesir, sambil membangun komitmen yang ada untuk kesetaraan gender, seperti yang terkandung dalam CEDAW (UN Women Egypt Country Office, 2017)

Dalam konteks mekanisme koordinasi inilah UN Women juga berhasil berkolaborasi dengan badan-badan PBB di bawah program WPE di beberapa proyek; misalnya, dengan UNDP untuk mengerjakan proyek pengadaan KTP, dan program bersama Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Hukum terhadap perempuan Mesir dari UN Women, UNDP dan UNFPA. (United Nations, 2020) Program WPE membawa nilai tambah melalui pengalaman terdahulu dan pengalaman terbarunya, baik di tingkat nasional maupun internasional. UN Women juga membawa pengalaman internasional melalui akumulasi pelajaran yang didapatkan dari berbagai negara, khususnya negara berkembang yang kemudian dapat menjadi contoh betapa pentingnya partisipasi politik perempuan.

Untuk mendapat informasi dan pengembangan laporan mengenai situasi yang terjadi di Mesir maka dilakukan berbagai tinjauan, wawancara, pemetaan pemangku kepentingan dan kunjungan lapangan untuk mendapatkan data yang luas. Pemangku kepentingan berkonsultasi termasuk inffroman dari staf dan mitra UN Women yaitu NCW. Di samping itu, untuk menambah informasi data maka LSM, anggota parlemen terpilih, donatur, perusahaan media, dan yang terpenting perempuan yang telah memiliki KTP juga diundang untuk menghadiri acara advokasi.

Program WPE juga mendukung Persatuan Feminis Mesir untuk beradvokasi dengan partai politik dalam hal menggerakkan isu partisipasi perempuan ke puncak agenda mereka selama pemilu. Dengan dukungan dan intervensi program WPE, beberapa langkah diambil oleh badan penyelenggara





pemilu dan lembaga sektor keamanan untuk mempromosikan dan memfasilitasi partisipasi yang aman bagi perempuan dalam politik. TPS didirikan hanya untuk perempuan, dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi untuk mendorong perempuan memiliki suara aktif dan berpartisipasi dalam pemilu.

Strategi paling efektif dalam pemberdayaan politik perempuan adalah melakukan reformasi, tidak hanya terhadap lembaga politik. Program WPE yang baru harus bisa menjangkau ruang publik dan politik yang baru. Saat mempertimbangkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik, pemberdayaan juga harus mempertimbangkan akses dan mobilisasi perempuan baik secara formal dan informal, ruang publik dan politik.

Dalam meningkatkan dukungan untuk pelembagaan perempuan serta unit pemberdayaan politik, diperlukan kurikulum dan anggaran khusus untuk pembangunan kapasitas politik. NCW berencana untuk bekerja sama dengan pusat pelatihan di parlemen dan mengikut sertakan pemanagku kepentingan lain untuk ikut turut membantu.

Meskipun WPE dinilai sangat cekatan dalam mengupayakan peningkatan partisipasi politik perempuan di Mesir, budaya konservatif masyarakat masih menjadi faktor penghalang yang cukup besar. Kekhawatiran pada keamanan juga menciptakan tantangan di lapangan dan mempengaruhi kemampuan relawan, penggerak desa, dan kelompok pemuda untuk melakukan kegiatan penyadaran publik yang berkaitan dengan keterlibatan sipil, hak kewarganegaraan perempuan, dan upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, program WPE masih bisa memperluas kemitraan kelembagaan dan non-kelembagaan untuk memasukkan beragam mitra non-tradisional, di luar spesialisasi gender. Beberapa anggota parlemen menyatakan kekhawatiran mereka mengenai kelompok heterogen yang berasal dari etnis, latar belakang sosial dan tingkat Pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa pelatihan kesetaraan gender yang dirancang lebih lanjut dan juga pembentukan tim pelatihan khusus mengenai diskriminasi akan membantu untuk memecahkan berbagai ketegangan.

Program WPE mengandalkan formulasi desainnya pada pilihan mitra yang diundang ke beberapa lokakarya. Perlu digarisbawahi bahwa seleksi kemitraan sangatlah penting, jika tidak dipilih dengan baik dapat menunda dan berdampak negatif terhadap intervensi. Oleh karena itu, disarankan agar fase baru dibangun berdasarkan pembelajaran tersebut, dan memutuskan pemilihan pasangan





berdasarkan partisipatif dan menguraikan analisis pemangku kepentingan tepat sebelum dimulainya intervensi. Hal ini dapat dilakukan melalui lokakarya partisipatif di mana mitra diperkenalkan satu sama lain untuk mengembangkan visi bersama dan memutuskan pembagian peran berdasarkan kekuatan dan kelemahan mereka. Praktik yang baik harus mencakup perencanaan pendekatan partisipatif, pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan dan mengevaluasi sistem.

Kerja sama yang ideal dalam meningkatkan partisipasi perempuan khususnya dalam ruang publik dan politik harus melibatkan masyarakat lokal, seperti terlibat dalam merancang kebijakannya. Segala usaha untuk menjangkau masyarakat umum harus dikembangkan, seperti melalui layanan publik dan kampanye yang menampilkan betapa pentingnya kontribusi perempuan dalam ruang publik dan politik. Jangkauan terhadap seluruh lapisan masyarakat di semua tingkatan bisa dimulai dengan menginformasikan advokasi untuk keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja.

Di balik keberhasilan kerjasama yang dilakukan oleh UN Women dan NCW maupun dengan mitra lainnya, tentu tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Setiap hambatan tentunya perlu jalan keluar dan penyelesaian. Laporan akhir NCW yang dikatakan oleh LSM, anggaran inisiatif cukup untuk menutupi kegiatan yang telah direncanakan dan memperkuat kapasitas, namun anggaran yang sudah ada tidak cukup untuk kegiatan dan pembangunan keberlanjutan. Program WPE kemungkinan akan menghadapi tantangan keuangan karena sumber daya inti UN Women hanya cukup untuk menutupi biaya operasional. ECO dapat meninjau intervensi di berbagai bidang tematik dengan keterkaitan WPE untuk menutupi pengeluaran terkait program WPE melalui pendekatan program yang lebih komprehensif. Seperti yang disarankan oleh seorang donatur, staf UN Women dapat memperoleh manfaat lebih lanjut melalui pelatihan dan kesempatan belajar tentang proses mereka mitra (donor), untuk memahami mekanisme dan pelaporan keuangan, dan implementasi program dengan lancar.

Negara Mesir yang kental dengan kebudayaan dan keagamaan yang kental seringkali menimbulkan persepsi yang salah di antara masyarakat dan kemudian menghasilkan budaya patriarki yang akhirnya menghambat perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam ruang publik dan politik. Hal tersebut juga yang seringkali membuat kerja sama menjadi sulit karena berbagai pihak masih belum teredukasi secara menyeluruh.





Dimasukkannya kemitraan non-tradisional seperti dalam kasus partisipasi perwakilan dari Al-Azhar selama kegiatan peningkatan kesadaran NCW sangat bermanfaat. Hal ini dikarenakan mereka membahas keyakinan sosial negatif yang terkait dengan tradisi Islam dan karenanya memotivasi perempuan untuk berpartisipasi, terutama dalam aturan konservatif yang ketat. Pelajaran yang dapat dipetik di sini juga berkaitan dengan keterkaitan antar intervensi atau komponen, karena seharusnya hanya dibuat jika diperlukan dan tidak dipaksakan, dan juga untuk membangun hubungan yang sudah ada dengan pemangku kepentingan daripada harus memulai dari awal.

Kemitraan yang baik juga harus dipertahankan jika mitra berkoordinasi dengan baik dan tahu tentang pekerjaan masing-masing. Kemitraan seperti itu harus bersifat jangka panjang dan tidak berakhir setelah intervensi proyek. UN Women dan mitranya harus didorong untuk bertemu dua kali setahun untuk berbagi kemajuan dan mencari dukungan dari rekan-rekan. Berbagi pengalaman adalah praktik yang baik untuk mempromosikan keberlanjutan terhadap inisiatif apa pun, misalnya, melalui pembuatan platform di Facebook untuk peserta pelatihan sebagai tempat mereka untuk dapat mendiskusikan acara mendatang dan mempertahankan hubungan di antara mereka sendiri sebagai sebuah kelompok dan juga memperbesar lingkaran mereka. Beberapa contoh dari praktek ini telah ditemukan dilakukan oleh peserta perempuan dewan lokal.

UN Women perlu meningkatkan dukungan untuk Pelembagaan Politik Perempuan Di Unit Pemberdayaan dan mendukung pelembagaan unit dalam NCW dengan struktur, kurikulum, dan anggaran khusus untuk politik pembangunan kapasitas. NCW berencana untuk bekerja sama dengan pusat pelatihan di parlemen dan untuk mengikutsertakan dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu Inisiatif Kewarganegaraan perlu meningkatkan tidak hanya dalam jumlah tetapi dengan mengadopsi mode yang berbeda untuk memastikan perempuan yang memperoleh KTP benar-benar menggunakannya, dan dapat mengakses layanan publik yaitu melalui peningkatan kesadaran dan hubungan. Dengan demikian, penskalaan perlu dilakukan keduanya horizontal (dalam jumlah) dan vertikal (dalam tematik). Ini bisa dilakukan melalui menghubungkan penerbitan KTP untuk tindakan dan layanan misalnya untuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, beasiswa, konseling kesehatan atau hukum.





Model kerja sama triangular yang sekarang diadopsi dalam Kewarganegaraan Inisiatif antara NCW, Kementerian Dalam Negeri dan LSM lokal perlu dilakukan, direplikasi dan ditingkatkan sebagai model dan dilembagakan secara formal di untuk memastikan baik scaling up serta keberlanjutan layanan (UN Women Egypt Country Office, 2017). Demikian pula, keberlanjutan suatu inisiatif juga dapat dipromosikan melalui penyediaan database peta pemberdayaan politik di Mesir dan praktik sosialisasi yang dicapai melalui program WPE atau ditemukan relevan dari daerah lain.

Penutup

Partisipasi politik penuh dan efektif oleh kaum perempuan termasuk dalam masalah hak asasi manusia, pertumbuhan inklusi dan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan politik perempuan merupakan syarat esensial demokrasi pemerintahan dan dapat diukur baik dari segi hak hukum yang diberikan kepada perempuan untuk bisa memilih, mengekspresikan pendapat, dan mencalonkan diri untuk jabatan terpilih serta dalam pelaksanaan praktis dari hak-hak hukum. Berpartisipasi dalam lembaga publik seperti parlemen, dewan lokal atau pemerintahan memungkinkan perempuan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pembuatan hukum yang nantinya akan berdampak pada hak, perilaku dan hidup.

Penelitian ini juga menganalisis praktik dari konsep kerjasama internasional pada kerjasama yang dilakukan oleh UN Women dan NCW dimana kerjasama internasional sangat diperlukan dan berpengaruh penting dalam membantu negara untuk bekerjasama mencapai kepentingannya. Kerjasama UN Women dan NCW merupakan pengamalan implementasi UN Women telah menjalankan fungsi organisasi internasional. UN Women mengutamakan prinsip-prinsip mandat yaitu keterlibatan dengan semua anggota tim secara inklusif dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil terbaik. Dalam menguatkan fungsi dan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Mesir maka dilakukan kerjasama antara organisasi Internasional yaitu UN Women dengan organisasi independen milik Mesir yaitu NCW.

Kerjasama internasional antara UN Women dan NCW dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik karena dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terhadap partisipasi politik perempuan di Mesir. Masyarakat juga menjadi lebih peduli mengenai isu-isu kesetaraan gender. Program WPE juga terbukti telah memberdayakan perempuan dalam setiap kegiatan publik khususnya politik.





Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemegang kekuasaan di Mesir, WPE mendorong terciptanya regulasi-regulasi yang membantu pemberdayaan politik perempuan. Kampanye-kampanye yang dilakukan mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan karena timbul sikap toleransi dan menghargai hak-hak perempuan. Dengan menggandeng para pemuka agama, persepsi yang salah mengenai kaum perempuan bisa dihilangkan sehingga kaum lelaki yang menganut keras budaya patriarki menjadi tereduksi.

Referensi

Artikel Jurnal

- About UN Women*. (n.d.). Retrieved from UN Women: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- AUEOM. (2016). *Final Report: 2015 Parliamentary Elections in the Arab Republic of Egypt*. African Union Election Observation Mission.
- El-Rashidi, S. (2014, April 24). *Egyptian women campaign for larger role in parliament*. Retrieved from Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/originals/2014/04/egypt-women-dostour-parliament-rights.html#>;
- Garcia, L., & Ziada, D. (2012, January 19). *In Egypt's New Parliament, Women Will Be Scarce*. Retrieved October 12, 2022, from NPR: <https://www.npr.org/2012/01/19/145468365/in-egypts-new-parliament-women-will-be-scarce>
- International IDEA. (2013). *Political Parties in Africa through a Gender Lens*. Retrieved from <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/political-parties-in-africa-through-a-gender-lens.pdf>
- Jamilah, Maryam. (2017). *Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011*. Buana Gender.
- Jayachandran, S. (2015, Agustus). *The Roots of Gender Inequality in Developing Countries*. 74-84.
- Khodair, A. A. (2015). *Women's Political Participation in Egypt: the Role of the National Council for Women*. *Academic Research Journals*.
- Markham, S. (2013). *Women as Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing Policy*. *Women's Voice, Agency, and Participation Research Series, No. 5*.
- Mazen Hassan, P. (2018). *Women in the Egyptian Parliament: A Different Agenda?* *ISSUE BRIEF*.





-
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriaki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*.
- Sahid. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Gahalia indonesia .
- Sanyal, P. (2016). Parliamentary Election in Egypt 2015. *Contemporary Review of The Middle East*.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Suryadi, B. (2007). *iSosiologi Politik Sejarah, Definisi danP erkembangan Konsep*. Yogyakarta.
- UN Women. (n.d.). Retrieved from About UN Women: <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (2018). *Achievements Report 2018*. UN Women.
- Women, U. (n.d.). *About UN Women*. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- World Economic Forum. (2015). *The Global Gender Gap Report (2015)*. Retrieved from The Global Gender Gap Report 2015.
- Zeid, G. A. (2006). *The Arab Region: Women's access to the decision-making process across the Arab nation*. Routledge.

